

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Perangkat & Kepala Desa Protes Keterlambatan Dana

Entitas / Cakupan : Kabupaten Cianjur

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal.8

Edisi : Kamis, 12 April 2018

Perangkat & Kepala Desa Protes Keterlambatan Dana

CIANJUR, (PR).-

Ratusan kepala dan perangkat desa di Cianjur memprotes keterlambatan pencairan dana desa, alokasi dana desa, dan penghasilan tetap (siltap). Sudah 2 pekan, bahkan 4 bulan lebih dana tersebut belum cair, padahal pengajuan berkas telah dilakukan sejak lama. Terdapat isu jika dana tersebut didepositkan oleh pihak terkait.

Menindaklanjuti hal itu, rombongan kepala dan perangkat desa mendatangi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Seluruh pihak mempertanyakan permasalahan yang terjadi di tingkat BPKAD sehingga hak mereka tak kunjung dibayarkan.

"Kalau memang kesalahan ada pada kami, seharusnya segera diinformasikan supaya bisa dikoreksi. Tapi, selama ini kami merasa sangat teliti. Titik koma dalam berkas saja kami perhatikan," kata Kepala Desa Sukamulya, Wawan Suwandi, Rabu (11/4/2018).

Bukan hanya itu, 200 kades dari total 354 desa juga mengklaim telah memenuhi seluruh prosedur dengan sesuai. Bukan tanpa alasan, ketiga dana tersebut penting untuk operasional desa.

Apalagi, pemerintah desa pun terus mendapat tekanan dari pusat. Pihak desa terus diburu-buru oleh aturan pusat. Menurut dia, proses pemeriksaan oleh pemerintah pusat berlangsung cepat. Namun, keterlambatan pemasukan dari Pemkab terjadi berkali-kali.

"Jadi, memang melihat dari yang sudah-sudah, masalahnya selalu sama. Ini artinya BPKAD yang perlu perbaikan sistem. Bagaimana ini? Apalagi Musrenbang Desa sebentar lagi," ujarnya saat audiensi di Kantor BPKAD Cianjur.

Melalui audiensi itu, para kepala desa menilai ada kesalahan yang dilakukan BPKAD dalam pencairan ketiga dana. Soalnya, pimpinan BPKAD bersikeras bahwa seluruh dokumen yang diajukan akan segera diproses di hari yang sama atau maksimal tertunda satu malam dengan estimasi pencairan paling lambat dua hari.

Namun, kenyataannya, tidak ada dana yang cair selama berbulan-bulan. Ketika dikonfirmasi kepada BPKAD, petugas terkait mengaku berkas belum ditandatangani pimpinan sehingga dana belum dicairkan.

Hal tersebut lantas menimbulkan pertanyaan dari para kades mengenai keberadaan dana yang dimaksud. "Jadi, sebenarnya dananya ada atau tidak? Karena setiap ditanya, bilangannya sudah diproses. Ketika ditunggu tetap belum cair, ngakunya belum diproses," ucapnya.

Selain itu, keanehan juga terjadi ketika akhirnya dana cair. Misalnya, siltap dicairkan tetapi dana desa dan alokasi dana desa tidak begitu pun sebaliknya. Padahal, pengajuan ketiganya sama-sama memenuhi syarat.

"Solusinya gini saja, dahulukan alokasi dana desa saja dulu. Karena ada hak kami di sana. Pokoknya, perjuangan untuk Apdesi saja dulu, yang penting ada *income* (pemasukan)," ujarnya.

Rombongan pun mengancam akan menghadirkan perangkat desa seluruh Kabupaten Cianjur jika masalah itu tak kunjung menemukan solusi sama sekali.

Audiensi berjalan panas ketika akhirnya pimpinan BPKAD menjanjikan pencairan di hari yang sama bagi mereka yang hadir dan memenuhi persyaratan. BPKAD pun meminta maaf secara langsung kepada para kades.

"*Ari kamari ka mana wae atuh Pa!* (Kemarin ke mana saja Pak)" ujar seorang peserta audiensi setelah mendapat jawaban.

Kepala BPKAD Dedi Sudrajat berusaha menanggapi pernyataan itu dengan terbuka. Ia pun mengakui bahwa kondisi saat itu terjadi karena kesalahan BPKAD. **(Shofira Hanan)*****